



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



Australian Government

Memperkuat Peluang Ekonomi Untuk Keluarga PKH: Ringkasan

Penulis: Karishma Huda & Diah Hidayati (MAHKOTA) dan Lembaga Penelitian SMERU (Ana R. Tamyis dan Tim)¹

Pengantar dan Metodologi Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Program bantuan tunai bersyarat unggulan Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk membantu keluarga miskin dengan ibu hamil dan anak-anak². Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antar-generasi dalam jangka panjang dengan berinvestasi di bidang kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak, sehingga meningkatkan pengembangan sumber daya manusia generasi mendatang. Dalam jangka pendek, transfer dana dimaksudkan untuk mengurangi kesulitan yang sedang dihadapi, merangsang konsumsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (TNP2K, 2018). PKH mencapai 10 juta keluarga di seluruh Indonesia dan diakui sebagai program bantuan tunai bersyarat terbesar kedua di dunia.

Evaluasi dampak dari Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa setelah enam tahun pelaksanaannya, program ini telah secara signifikan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ini bukan pengganti pekerjaan dan karena itu belum membantu keluarga untuk mandiri dalam hal mata pencarian mereka (Cahyadi et al. 2018; TNP2K, 2015). Mereka tidak berinvestasi dalam aset produktif dan konsumsinya tidak meningkat secara signifikan (Cahyadi et al., 2018), meskipun penelitian yang ada untuk menetapkan alasan untuk hasil ini masih terbatas.

Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa perlindungan sosial - khususnya dalam bentuk transfer tunai - merangsang ekonomi dan mengarah pada peningkatan partisipasi dan produktivitas pasar tenaga kerja (McCord dan Slater, 2015). Program bantuan tunai bersyarat seperti PKH mendorong keluarga untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga memperkuat kualitas angkatan kerja suatu negara di masa depan. Jika jumlah transfer cukup, memungkinkan penerima untuk memulai usaha mikro dan mengakses pekerjaan dengan upah (Gertler et al., 2017; Handa et al., 2017; Samson et al., 2008). Terakhir, bantuan tunai membantu keluarga yang terkena guncangan, misalnya, dengan mengurangi kemungkinan mereka akan menjual aset produktif sebagai strategi *coping* (mengatasi masalah) (OPM dan IDS, 2012).

Di sisi lain, bukti juga menunjukkan bahwa transfer tunai saja tidak cukup untuk secara sistematis mengatasi hambatan struktural dalam memperoleh pekerjaan dan mata pencarian berkelanjutan yang dihadapi oleh orang miskin dan rentan (McCord, 2018). Menanggulangi hambatan semacam itu membutuhkan tinjauan lebih dekat terhadap alasan rendahnya produktivitas dan lapangan kerja dengan upah yang rendah di antara segmen penduduk termiskin di Indonesia.

¹ Peneliti dan penulis laporan dari Lembaga Penelitian SMERU adalah Ana Rosidha Tamyis; Akhmad Ramadhan Fatah; Dyan Widyaningsih; Fatin Nuha Astiti; Gema Satria Mayang Sedyadi; Hafiz Arfyanto; Jimmy Daniel Berlianto Oley; Michelle Andrina; Muhammad Adi Rahman; Nila Warda; Nina Toyamah; Veto Tyas Indrio; Widjajanti Isdijoso.

² Pada 2016, pemerintah Indonesia menambahkan manfaat *top-up* bagi keluarga PKH yang memiliki anggota keluarga lansia dan/atau penyandang disabilitas di dalam keluarga mereka.

Singkatnya, mengapa penerima PKH mengalami tantangan untuk memperoleh mata pencarian yang berkelanjutan, dan bagaimana hal ini dapat diatasi?

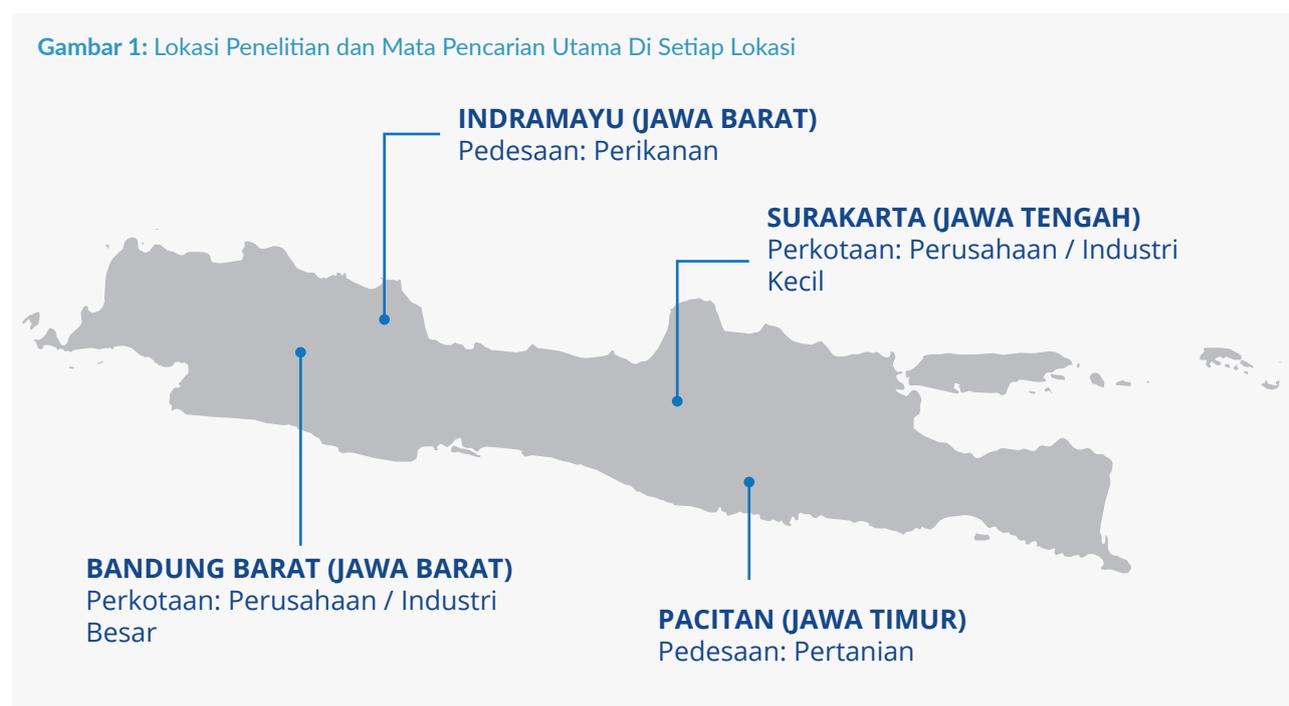
Menanggapi kondisi tersebut, program MAHKOTA menugaskan Lembaga Penelitian SMERU (SMERU) untuk melakukan analisis terperinci tentang peluang memperkuat mata pencarian keluarga penerima manfaat PKH. Studi ini mengeksplorasi:

- Profil ekonomi dan karakteristik anggota usia kerja dalam keluarga PKH;
- Ketersediaan layanan mata pencarian yang dilaksanakan pemerintah di wilayah studi dan sejauh mana keluarga PKH menggunakan dan mengambil manfaat dari skema ini;
- Aspirasi ekonomi keluarga PKH dan hambatan kontekstual untuk mencapainya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis bagaimana menghubungkan anggota keluarga PKH usia kerja dengan intervensi mata pencarian tambahan sesuai dengan konteksnya, dengan tujuan mengatasi tantangan mata pencarian berkelanjutan pada keluarga PKH dan meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka dalam jangka panjang.

Metodologi

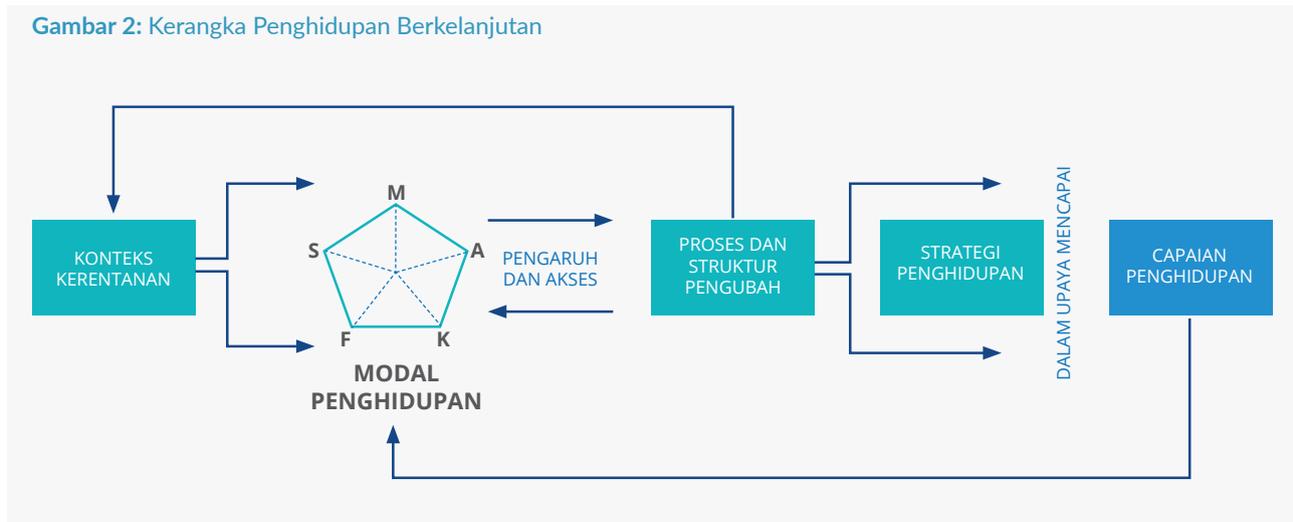
Penelitian ini dilakukan dari Februari hingga Juni 2019 di empat kabupaten di Jawa: Surakarta, Bandung Barat, Pacitan dan Indramayu. Daerah sampel mewakili keluarga PKH dengan berbagai sumber mata pencarian: sektor perikanan di wilayah pesisir Indramayu; sektor pertanian di pedesaan Pacitan; perusahaan mikro skala kecil di pinggiran kota Surakarta; dan pekerjaan formal atau informal di perusahaan kecil hingga menengah di perkotaan Bandung Barat.



Metode kualitatif yang mendalam dan kuantitatif mencakup 200 keluarga penerima manfaat dan 539 responden, termasuk semua anggota keluarga usia kerja, pejabat pemerintah daerah, dan pemilik bisnis atau pengusaha.

Tim peneliti menggunakan kerangka mata pencarian yang berkelanjutan sebagai lensa analitis, memungkinkan menghubungkan berbagai bentuk modal yang dapat diakses keluarga PKH (manusia, fisik, keuangan, alam dan sosial) serta strategi mata pencarian yang mereka ingin capai (DFID, 1999).

Gambar 2: Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

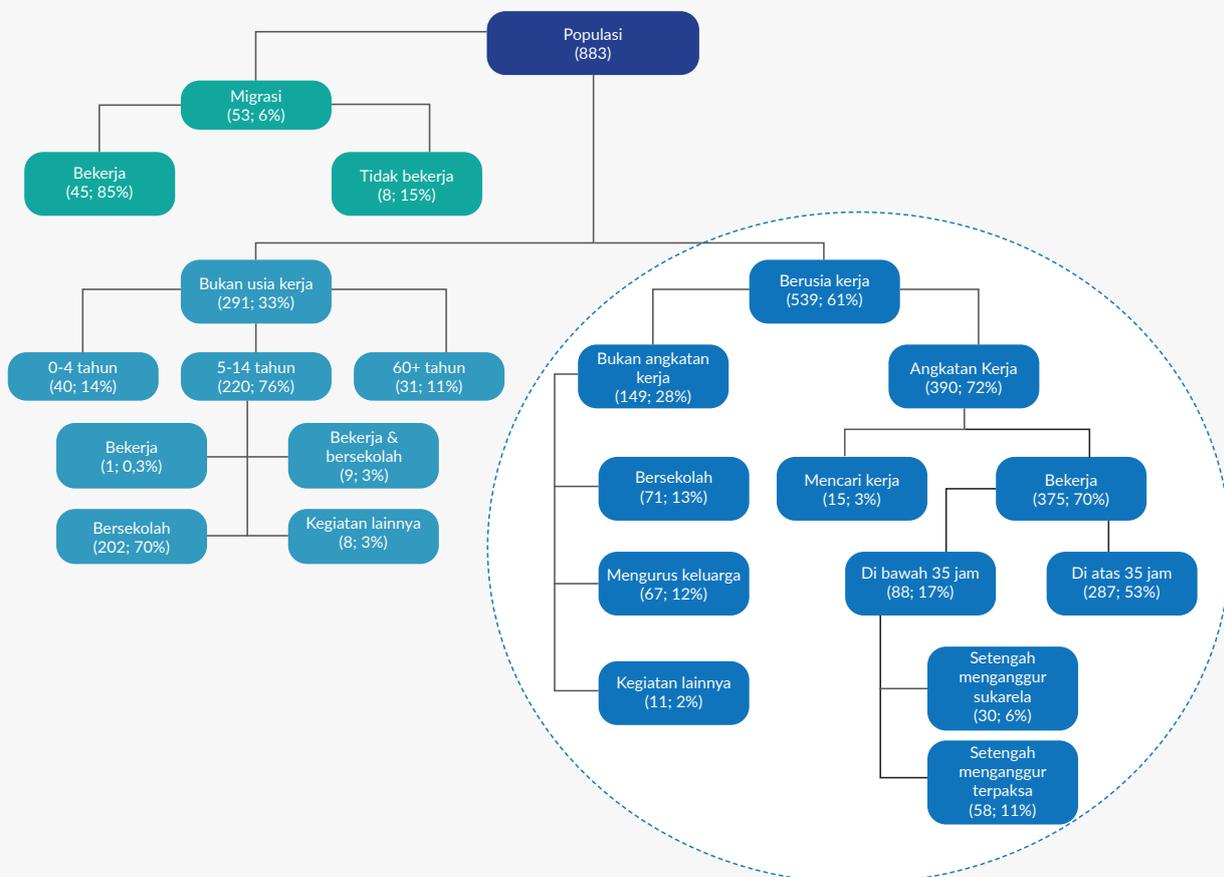


Misalnya, tingkat **modal manusia**, seperti keterampilan, kualifikasi, dan pendidikan, sangat memengaruhi peluang mata pencarian yang dapat diakses oleh anggota keluarga PKH, khususnya dalam konteks perkotaan dan semi-perkotaan. **Modal sumber daya alam dan fisik**, seperti tanah subur dan sistem irigasi, adalah aset penting bagi mereka yang terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan. Akses ke **sumber daya keuangan** diperlukan untuk mengimbangi biaya mobilitas tenaga kerja dan penyediaan modal awal usaha. **Jaringan sosial** biasanya memediasi akses informasi tentang peluang kerja, pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan dan layanan dukungan lainnya. **Modal fisik** dan kualitas infrastruktur memungkinkan (atau menghambat) keluarga mengakses pasar, pusat pelatihan, kantor pemerintah, dan tempat kerja. Memediasi struktur pemerintah dan kualitas layanan juga berdampak terhadap *outcome* mata pencarian yang dapat dicapai keluarga PKH.

Profil Ekonomi Anggota Keluarga PKH Usia Kerja

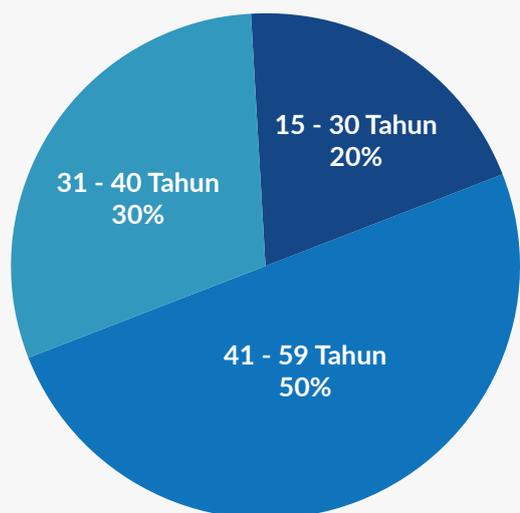
Dari anggota keluarga PKH yang diwawancarai, 61 persen berusia kerja (15–59 tahun) dan 72 persen anggota keluarga ini aktif bekerja atau mencari pekerjaan, sementara 28 persen tidak bekerja karena mereka masih bersekolah atau memiliki tugas mengurus keluarga. Keluarga PKH yang diwawancarai rata-rata terdiri dari empat anggota keluarga dengan setidaknya satu orang dewasa muda (antara 15-30 tahun) (lihat Gambar 3). Sekitar 49 persen dari sampel adalah perempuan dan 51 persen adalah laki-laki. Rincian usia mereka ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 3: Sampel Responden, Dikelompokkan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan³



Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Gambar 4: Pembagian Usia Anggota Keluarga PKH yang Bekerja



Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

³ Menurut Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Biro Statistik (BPS), 'usia kerja' hanya mempertimbangkan mereka yang bertempat tinggal di rumah tangga. Statistik migrasi dihitung secara terpisah. Angka sedikit kurang dari 100% karena efek pembulatan.

Diantara keluarga PKH dalam penelitian ini, 26 persen keluarga setidaknya memiliki satu anggota keluarga yang menderita penyakit menahun dan 13 persen setidaknya memiliki satu anggota keluarga penyandang disabilitas sedang atau berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak keluarga menanggung beban ekstra merawat anggota keluarga yang rentan. Kohort dengan prevalensi tertinggi penyakit kronis atau disabilitas adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas, meskipun prevalensi penyakit kronis yang relatif tinggi (26 persen) dan disabilitas (20 persen) di antara orang muda berusia 15-30 tahun cukup mengkhawatirkan (**Tabel 1**).

Tabel 1: Prevalensi Penderita Penyakit Kronis dan Penyandang Disabilitas pada Keluarga Sampel⁴

Kelompok Usia	Penyakit Kronis		Disabilitas (5 tahun+)	
	%	n	%	n
0-14/5-14	6,5	262	4,1	220
15-30	25,6	216	20,1	216
31-40	15,4	149	4,7	149
41-59	32,4	225	13,8	225
60+	53,3	30	67,7	31
Total (individu)	16,9	882	9,5	841
Total (keluarga)	26,4	201	12,9	201

Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Secara keseluruhan, anggota keluarga laki-laki dalam sampel penelitian kami memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi (84 persen) daripada perempuan (61 persen). Namun, tingkat partisipasi perempuan ini masih lebih tinggi daripada tingkat partisipasi rata-rata nasional (sekitar 52 persen) (Bank Dunia, 2019). Responden perempuan biasanya mengaitkan hal ini dengan tantangan yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan dengan jam kerja fleksibel agar bisa tetap melakukan tugas domestik. Hal ini khususnya banyak terjadi pada keluarga yang masih memiliki anak-anak balita.

Di Pacitan, karena pekerjaan sektor pertanian bersifat fleksibel, 50 persen perempuan bekerja pada sektor ini. Akan tetapi, di Bandung Barat perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan fleksibel atau paruh waktu di pabrik atau perusahaan dan persentase perempuan yang bekerja turun menjadi 34 persen (lihat Tabel 2). Meskipun demikian, jenis pekerjaan dengan upah yang dilakukan perempuan lebih bervariasi di Bandung Barat dan mencakup, misalnya, pekerjaan rumah tangga, menyetrika, merawat anak, dan menjual makanan siap saji.

⁴ Pertanyaan disabilitas mengacu pada kuesioner Susenas dan Sakernas, yang mengacu pada Washington Consensus, pertanyaan-pertanyaan ini didesain untuk individu berusia 5 tahun ke atas. Sumber: <http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/12/Disability-Measurement-and-Monitoring-Using-the-WG-Disability-Questions-July-2018.pdf>

Tabel 2: Anggota Keluarga Usia Kerja yang Bekerja: Karakteristik Demografis

Kategori		Kabupaten (%)				Total	
		Indramayu	Bandung Barat	Surakarta	Pacitan	%	N = 375
Jenis Kelamin	Perempuan	41,1	34,4	41	50,6	41,6	156
	Laki-Laki	58,9	65,6	59	49,4	58,4	219
Kelompok Usia	15-30	20	25,8	17	14,9	19,5	73
	31-40	29,5	32,3	31	33,3	31,5	118
	41-59	50,5	41,9	52	51,7	49,1	184
Pendidikan (15 th+)	SD dan lebih rendah	80	59,1	38	67,8	60,8	228
	SMP	15,8	24,7	29	29,9	24,8	93
	SMA/SMK	4,2	15,1	30	2,3	13,3	50
	Universitas	0	1,1	3	0	1,1	4

Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan yang umumnya rendah dari anggota keluarga sampel (Tabel 2), lebih dari 60 persen dari mereka yang bekerja memiliki pendidikan dasar atau lebih rendah, terutama di Indramayu dan Pacitan. Di kedua kabupaten, penduduk usia 40 tahun ke atas sebagian besar memiliki pendidikan SD dan beberapa tidak menyelesaikan kelas enam SD karena mengalami kesulitan mengakses pendidikan di masa lalu. Bahkan saat ini warga di beberapa dusun merasa sulit untuk mengakses pendidikan karena kondisi jalan yang buruk dan kurangnya sekolah menengah atau yang setara. Akibatnya, hanya sedikit anggota keluarga PKH usia kerja dapat memperoleh pekerjaan berketerampilan tinggi. Kondisi ini menunjukkan populasi perkotaan memiliki akses sekolah yang lebih baik, sebagaimana tercermin dalam 30 persen responden yang telah menyelesaikan sekolah menengah di Surakarta dibandingkan dengan 2,3 persen di Pacitan dan 4,2 persen Indramayu.

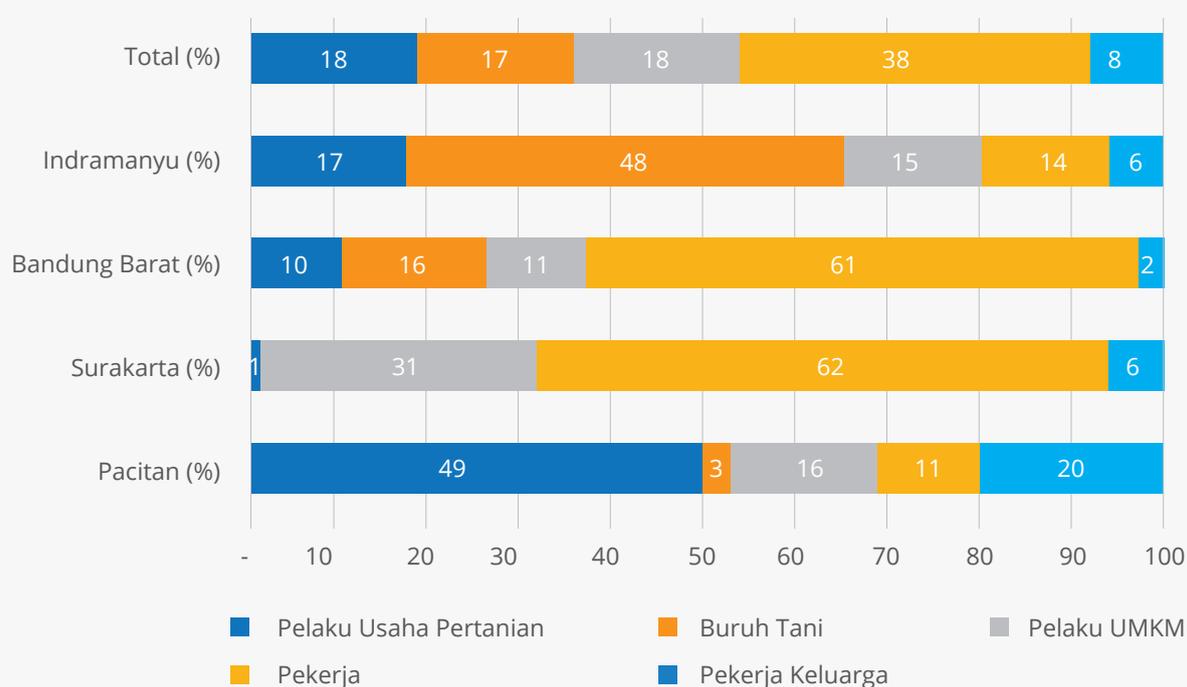
Anggota keluarga yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan lebih tinggi biasanya berusia 15-30 tahun, tetapi hanya 20 persen dari mereka yang merupakan bagian dari angkatan kerja. Sementara sekitar 13 persen dari kelompok usia ini masih belajar, dimana sebagian besar merasa sulit untuk menggunakan ijazah SMA untuk mendapatkan peluang yang lebih menguntungkan daripada yang dimiliki orang tua mereka. Namun, di Bandung Barat persentase kelompok usia muda yang dipekerjakan meningkat menjadi 26 persen, sebagian besar karena peluang yang lebih besar di daerah perkotaan.

Temuan ini menunjukkan kesesuaian dengan data nasional yang menunjukkan bahwa lebih dari 35 persen orang muda miskin (usia 15-24) tidak berada di sektor pendidikan, pekerjaan atau pelatihan (TNP2K, 2018). Ada juga elemen gender karena 7 persen anak perempuan dan perempuan berusia 15-19 tahun telah melahirkan dan 49 persen perempuan berusia 20-24 tahun sudah memiliki anak (TNP2K, 2018).

Penghidupan Anggota Keluarga PKH Usia Kerja

Mata pencarian anggota keluarga PKH di empat kabupaten studi dapat dibagi menjadi empat kategori utama: pekerja pertanian (termasuk mereka yang mengoperasikan pertanian mereka sendiri dan pekerja di lahan pertanian orang lain); pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); karyawan dengan upah di sektor formal dan informal; dan pekerja keluarga yang tidak dibayar (lihat Gambar 5 untuk persentase masing-masing kategori). Daerah pedesaan dan perkotaan memiliki jenis mata pencarian dominan yang berbeda.

Gambar 5: Proporsi Anggota Keluarga PKH Berdasarkan Aktivitas Ekonomi



Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Karakteristik Petani dan Buruh Tani

Sekitar 36 persen responden bekerja di sektor pertanian dengan sekitar setengahnya mengelola pertanian mereka sendiri dan separuhnya lagi bekerja sebagai buruh tani. Sebagian besar pemilik pertanian adalah laki-laki, sedangkan sebagian besar buruh tani adalah perempuan. Perempuan juga sering bekerja sebagai buruh tani di ladang orang lain mengingat sifat pekerjaan yang musiman dan fleksibel, meskipun ini membuat mereka lebih rentan terhadap kondisi kerja yang buruk dan pekerjaan yang tidak aman.

Lebih dari separuh anggota keluarga yang bekerja di sektor pertanian, baik sebagai pemilik, pengelola atau buruh, berada dalam kelompok usia 41–59 tahun dan sepertiga lainnya berada dalam kelompok usia 31–40 tahun. **Mereka yang berusia di bawah 40 tahun biasanya adalah buruh tani musiman dan menambah penghasilan dengan melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai pekerja konstruksi atau penjual makanan. Mereka yang berusia di atas 40 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan.**

Pertanian biasanya dikelola dengan menggunakan modal minim dan alat sederhana - misalnya, hanya 13 persen menggunakan traktor (disewa dari tetangga) dan sebagian besar nelayan sehari-harinya menangkap ikan dengan kapal tidak bermotor, alat pancing dan jaring sederhana. Kurangnya alat produktif mengakibatkan rendahnya produktivitas dan hasil yang terbatas. Sebagian besar petani menggunakan teknik budidaya yang diwariskan turun-temurun dan kurang terpapar dengan metode pertanian 'modern' dan ini juga berkontribusi terhadap rendahnya keuntungan yang diperoleh.

Terbatasnya akses ke sumber daya alam - terutama air dan tanah - juga berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan perolehan keuntungan di kalangan petani PKH (lihat Tabel 3). Di Pacitan, 86 persen adalah pertanian tadah hujan dan hanya 5 persen mendapat manfaat dari sistem irigasi. Tidak ada yang menggunakan air tanah karena mereka tidak mampu menyewa pompa air, membatasi panen menjadi setahun sekali dan tidak memanfaatkan potensi tiga kali setahun dengan sistem irigasi. Meskipun Bandung Barat mendapat manfaat dari irigasi bendungan, industri tekstil skala besar di daerah tersebut sering mencemari air sehingga tidak dapat digunakan.

Tabel 3: Profil Usaha Pertanian Anggota Keluarga PKH

Indikator		Indramayu (N=16)	Bandung Barat (N=9)	Pacitan (N=43)	Surakarta (N=1)
Perempuan (%)		6,3	55,6	44,2	0
Kelompok usia					
	15-30 tahun	6,3	0	0	0
	31-40 tahun	18,8	44,4	37,2	0
	41-59 tahun	75	55,6	62,8	100
Subsektor					
	Padi dan palawija	6,3	77,8	67,4	0
	Hortikultura	0	11,1	11,6	0
	Perikanan tangkap	93,8	0	0	0
	Peternakan	0	11,1	16,3	100
Sistem irigasi					
	Tadah hujan	0	75	86,1	NA
	Irigasi semi teknis	100	25	8,3	NA
	Irigasi teknis (air tanah)	0	0	5,6	NA

Jenis Perahu Penangkapan ikan					
	Kapal motor	6,7	NA	NA	NA
	Perahu motor tempel	40	NA	NA	NA
	Tanpa perahu	53,3	NA	NA	NA
	Memiliki perahu sendiri	20	20	NA	NA
Orientasi pemasaran					
	Menjual seluruhnya	81,3	22,2	51,2	0
	Menjual sebagian	12,5	44,4	23,3	100
	Konsumsi sendiri sepenuhnya	6,3	33,3	25,6	0
Cara pemasaran					
	Menjual ke pasar	6,7	0	3,2	0
	Melalui pedagang perantara	93,3	83,3	87,1	0
	Menjual ke konsumen sekitar rumah	0	16,7	9,7	100

Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Keterangan:

* Surakarta adalah pinggiran perkotaan, karenanya keberadaan subsektor ini terbatas

** Hanya Indramayu sebagai kabupaten dengan wilayah pesisir dan komoditi perikanan

Lebih dari 80 persen keluarga responden memiliki tanah rata-rata 2.773 meter persegi dan 20 persen lainnya menggunakan tanah bersama dengan luas kurang dari 800 meter persegi. Mereka yang memiliki tanah bersama biasanya mewarisi dari orang tuanya, yang berarti bahwa untuk setiap generasi luas kepemilikan tanahnya semakin menyusut. Selain itu, topografi dan kualitas tanah juga menambah berat tantangan yang harus dihadapi. Lahan pertanian di Pacitan terdiri dari lereng bukit, sehingga membuat daerah tersebut rentan terhadap longsor. Hal ini mengakibatkan seringnya gagal panen dan hanya menyisakan lahan terbatas yang dapat ditanami hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Nelayan menghadapi kerentanan lingkungan dengan angin kencang dan ombak besar semakin memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh atau pekerja konstruksi dengan upah yang jauh lebih rendah.

Kelangkaan modal finansial, manusia, dan sosial semakin merongrong keluarga PKH yang memiliki agribisnis. Meskipun petani membutuhkan akses tanah dan alat-alat produktif yang lebih baik, akan tetapi **hanya 37 persen yang pernah mendapat pinjaman dan hanya 10 persen dari pinjaman berasal dari lembaga keuangan.** Kondisi ini mencerminkan situasi keluarga PKH di desil termiskin dari populasi dengan kapasitas pinjaman dan pembayaran yang terbatas. Sebagian besar lembaga keuangan formal memerlukan jaminan yang tidak dapat disediakan oleh keluarga-keluarga ini dan program pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) memerlukan bukti kelayakan bisnis - suatu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sebagian besar petani. Sementara persyaratan perbankan juga menyulitkan, dimana sebagian besar pemilik pertanian juga kurang percaya diri untuk mengambil pinjaman karena takut tidak mampu membayarnya kembali. Sebagian besar responden terbuka untuk meminjam uang dari bank Syariah karena dianggap 'berpihak pada orang miskin' dengan skema pembayaran yang fleksibel.

Hanya 18 persen keluarga PKH pemilik pertanian menjadi anggota koperasi tani yang menyediakan saluran pemasaran dan informasi penting tentang program pemerintah terkait, seperti benih bersubsidi, pupuk, dan pelatihan. Sebagian besar pemilik pertanian yang diwawancarai menganggap bahwa kelompok pertanian adalah untuk petani yang lebih kaya dan mereka dieksklusi karena tidak memiliki luas tanah cukup untuk memenuhi persyaratan keanggotaan. Akibatnya, sebagian besar keluarga PKH pemilik pertanian membeli benih dan pupuk dengan harga pasar. **Lebih dari 87 persen petani di Pacitan bergantung pada jasa perantara karena mereka memiliki pengetahuan terbatas tentang kemana harus menjual produknya.** Para nelayan lebih mudah bergabung dalam kelompok nelayan dan biasanya memperkenalkan anggotanya kepada pialang/broker yang dapat meminjamkan uang kepada nelayan selama musim sepi melaut, ketika ombak terlalu tinggi untuk menangkap ikan. Sebagai gantinya, para nelayan berkomitmen untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada broker (seringkali dengan harga di bawah harga pasar).

Karakteristik Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Medium (UMKM)

Menurut laporan Bank Dunia yang dipublikasikan baru-baru ini, Indonesia sedang mengalami transformasi struktural, dengan kesempatan kerja bergeser dari daerah perdesaan ke daerah kantong perkotaan (Bank Dunia, 2019). Sekitar 18 persen responden menjalankan usaha mereka sendiri dan sebagian besar (85 persen) berada di kelompok usia 31–59 tahun. **Sekitar 42 persen pemilik usaha adalah perempuan yang cenderung menjalankan usaha untuk menambah penghasilan suami mereka.** Pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang berusia 31–59 tahun umumnya memiliki pendidikan SD atau lebih rendah, sedangkan mereka yang berusia 15-30 tahun sebagian besar adalah lulusan SMP.

Hampir 80 persen pengusaha kecil menjalankan usaha warung makan atau berdagang barang (seperti pakaian bekas atau suku cadang). Jenis usaha ini yang dipilih karena pasokan barang mudah diperoleh dan sebagian besar toko seperti ini dapat dikelola dari rumah atau dekat dengan rumah, sehingga memungkinkan perempuan untuk tetap melakukan pekerjaan rumah tangga (lihat Tabel 4). Selain itu 20 persen wirausahawan lainnya bergerak di bidang jasa, seperti transportasi sepeda motor, layanan binatu, menjahit dan jasa konstruksi, atau memproduksi kerajinan tangan dan produk khusus lainnya. Pelaku usaha ini membutuhkan keterampilan khusus, yang biasanya mereka peroleh dari majikan sebelumnya atau belajar dari orang tua mereka.

Tabel 4: Karakteristik Demografis Pengusaha Kecil dan Menengah

Subsektor lapangan usaha	Kategori Usia			Total (n=69)	Jenis Kelamin		Total (n=69)
	15-30 tahun	31-40 tahun	41-59 tahun		Perempuan	Laki-laki	
Pengolahan Makanan/ Kerajinan	1,4	2,9	5,8	10,2	2,9	7,2	10,2
Perdagangan dan Rumah Makan	13	23,2	43,5	79,7	49,3	30,4	79,7
Jasa	0	7,2	2,9	10,1	5,8	4,3	10,1
Total	14,5	33,3	52,2	100	58,0	42,0	100

Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Meskipun pemilik usaha kecil memiliki potensi perolehan penghasilan yang lebih tinggi daripada pekerja pertanian, sebagian besar anggota keluarga PKH yang terlibat dalam kegiatan ini mengalami hambatan dalam siklus bisnis:

- **Sebagian besar pemilik usaha tidak memiliki izin usaha sehingga tidak dapat memperluas jangkauannya ke pasar komersial yang lebih besar.** Dari 69 pemilik usaha kecil yang diwawancarai, hanya lima industri rumah tangga yang memiliki PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) yang diperoleh melalui program lokal menawarkan bantuan dalam proses permohonan izin usaha. Seperti kebanyakan program pengembangan mata pencarian lainnya, penyebaran informasi dilakukan dengan tidak memadai dan sebagian besar keluarga PKH belum pernah mendengar tentang program-program tersebut.
- **Banyak pemilik usaha telah mencoba menjual produk mereka kepada pembeli perantara, tetapi mereka umumnya tidak dapat memenuhi standar kemasan, kebersihan, dan standar konsumen lainnya.** Hal ini disebabkan terutama karena mereka tidak memiliki alat, modal, dan pengetahuan produksi yang dapat bersaing di pasaran. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha yang memproduksi keripik singkong menjelaskan bahwa tanpa mesin penyerap minyak ia tidak dapat menyimpan keripiknya lebih dari seminggu - sehingga membatasi akses ke pasar yang lokasinya jauh. Keluarga PKH pemilik usaha lainnya menyayangkan bahwa mesin jahitnya yang sederhana tidak dapat melakukan jahitan canggih yang diminta pembeli, dan membuatnya tidak kompetitif di pasar yang jenuh.
- **Sebagian besar keluarga PKH pemilik usaha memiliki tingkat pendidikan dasar dan tidak memiliki keterampilan pembukuan untuk mengetahui kinerja usahanya.** Hanya 12 persen dari pengusaha PKH menyimpan catatan akuntansi tertulis dan sebagian besar mengatakan mereka menilai keuntungan atas dasar perhitungan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak juga yang mengakui bahwa anak-anaknya sering mengonsumsi persediaan dagangan dan mereka tidak memperhitungkannya.
- **Pengusaha PKH yang terlibat dalam layanan khusus memperoleh keterampilan secara informal dan tidak memiliki kualifikasi formal di bidangnya masing-masing.** Mereka merasa sulit untuk bersaing dengan penyedia layanan bersertifikat dan sering mengambil pekerjaan tambahan sebagai petugas parkir atau asisten rumah tangga atau melakukan pekerjaan kasar lainnya untuk menambah penghasilan mereka.

Tabel 5: Partisipasi Anggota Keluarga PKH pada Pelatihan Bersertifikasi

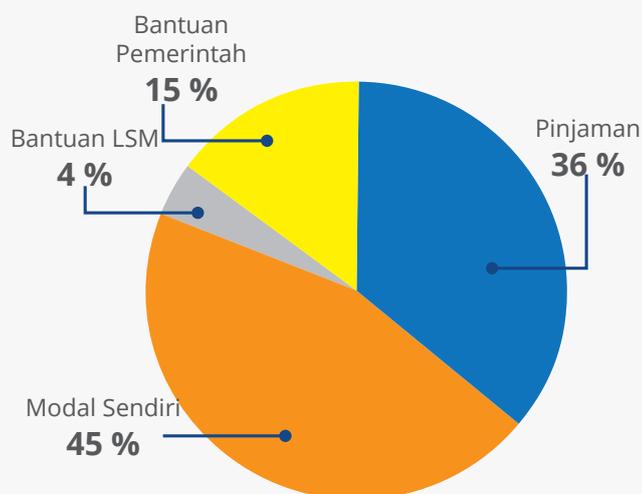
Subsektor Lapangan Usaha	Partisipasi dalam pelatihan bersertifikasi (%)
Pengolahan	0
Perdagangan dan Rumah Makan	4,3
Jasa	1,4
Total	5,7

Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Akibatnya, sebagian besar pengusaha PKH menjalankan usahanya dari rumah masing-masing dan menjualnya ke tetangga dan anggota keluarga. Hanya 20 persen responden mengatakan mereka menjual di pasar lokal selain menjualnya di rumah. Selain itu, 32 persen responden yang tinggal jauh dari pusat ekonomi mengalami kesulitan memasarkan barang dagangannya karena infrastruktur dan akses jalan yang tidak memadai.

Seperti halnya pemilik agribisnis, kendala modal keuangan terus membatasi peluang usaha bagi keluarga PKH. Namun, para pelaku usaha PKH lebih cenderung mengambil risiko daripada para petani dan sekitar 36 persen meminjam dana secara informal terutama dari rentenir lokal karena mereka umumnya tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman dari bank-bank komersial. Sebagian besar hanya menggunakan modal mereka sendiri yang terbatas dan sebagian kecil menerima hibah dari program pemerintah (15 persen) dan program non-pemerintah (4 persen) (**lihat Gambar 5**). Pemilik usaha kecil lebih terlibat secara sosial daripada petani karena mereka memahami pentingnya jaringan dalam memperluas basis konsumennya. Seorang penerima manfaat mengajukan diri untuk menjadi pengurus kelompok masyarakat agar dapat bertemu lebih banyak orang dan memperluas usaha jahitnya. Akan tetapi hubungan sosial horisontal ini tidak meningkatkan aksesnya ke modal, saluran pemasaran atau bahan baku.

Gambar 6: Sumber Pembiayaan Bagi Keluarga PKH Pemilik Usaha



Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Pemerintah daerah Surakarta telah mempromosikan pariwisata dan upaya ini menciptakan peluang bagi keluarga PKH pemilik usaha yang memproduksi kerajinan tangan lokal, menjalankan usaha warung makan dan menawarkan layanan jasa seperti binatu, menyetrika, dan pijat. Wawancara dengan keluarga PKH yang menjadi pengusaha sukses menunjukkan bahwa menenun bambu, membuat sangkar burung, barang-barang furnitur kecil, serta mengolah keripik singkong dan terasi merupakan pilihan yang menguntungkan, asalkan dijual di dekat pusat-pusat wisata. Kegiatan-kegiatan ini dapat menampung tenaga kerja perempuan dengan baik yang mencari pekerjaan fleksibel dengan keterampilan rendah (seperti, menjadi pengendara ojek atau menjalankan layanan binatu) atau keterampilan menengah hingga tinggi (seperti menjahit dan memperbaiki barang elektronik).

Karakteristik Karyawan di Sektor Perdagangan dan Jasa

Secara nasional, pangsa pekerjaan di sektor pertanian menurun dan pekerjaan di bidang perdagangan, restoran, hotel, dan layanan jasa pribadi meningkat (Bank Dunia, 2019). Namun, kualitas pekerjaan masih rendah, dengan 40 persen karyawan bekerja tanpa kontrak dan pertumbuhan pasar tenaga kerja masih didorong oleh tenaga kerja berketerampilan rendah (Bank Dunia, 2019).

Sektor pekerjaan non-pertanian di kabupaten tempat studi selalu didominasi oleh laki-laki (65 persen) meskipun distribusi usia pekerja di sektor ini cukup konsisten (lihat Tabel 6). Perempuan memiliki tugas mengurus keluarga dan membutuhkan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel daripada yang ditawarkan oleh pekerjaan formal.

Tabel 6: Persentase Anggota Keluarga Sampel yang Bekerja di Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa, Berdasarkan Kelompok Usia dan Pendidikan Tertinggi

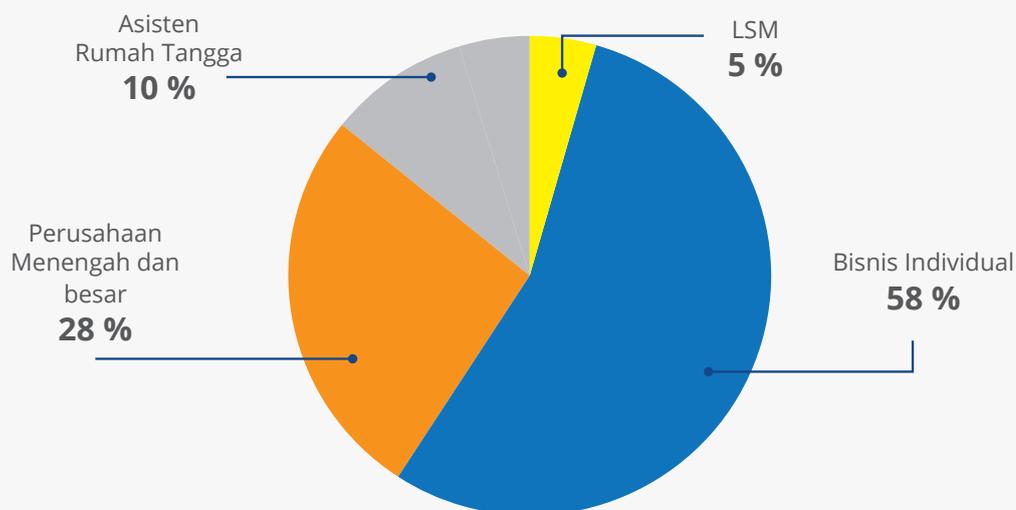
Kelompok Usia	Pendidikan Tertinggi (%)				Total (n=142)
	SD dan lebih rendah (n=54)	SMP (n=50)	SMA (n=36)	Universitas (n=2)	
15-30 tahun	2,8	11,3	14,1	1,4	29,6
31-40 tahun	13,4	14,8	5,6	0	33,8
41-59 tahun	21,8	9,2	5,6	0	36,6
Total	38	35,2	25,4	1,4	100

Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Tingkat pendidikan di antara pekerja non-pertanian dalam studi ini umumnya lebih tinggi daripada di sektor lain, dimana 27 persen responden memiliki tingkat pendidikan SMA atau setara dan lebih tinggi.

Lebih dari setengah dari pekerja ini adalah karyawan pada bisnis individu (kurang dari 10 karyawan), sekitar seperempat bekerja untuk perusahaan menengah hingga besar dan sisanya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah-rumah penduduk atau di lembaga pemerintah atau non-pemerintah (lihat Gambar 7). Responden yang bekerja untuk pemerintah atau perusahaan menengah hingga besar memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena pekerjaan ini menuntut pendidikan tingkat sekolah menengah atau lebih tinggi.

Gambar 7: Pekerjaan Anggota Keluarga PKH yang Bekerja Sebagai Karyawan Berdasarkan Persentase



Sumber: Diolah dari hasil survei, 2019

Responden yang mencari pekerjaan berupah menghadapi empat hambatan utama:

- Informasi yang tidak memadai tentang peluang kerja yang tersedia, khususnya bagi mereka yang memiliki jejaring sosial terbatas;
- Terbatasnya peluang kerja berupah untuk pekerjaan non-pertanian, khususnya di daerah perdesaan - sebagai akibatnya, mereka terpaksa untuk mencari peluang pekerjaan di luar kabupaten tempat tinggalnya, serta menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk mencari pekerjaan;
- Tanggung jawab mengurus keluarga, khususnya dalam keluarga dengan anggota lansia atau anak kecil - yang biasanya terjadi pada wanita yang menginginkan pengaturan kerja paruh waktu, meskipun pria yang mencari pekerjaan musiman juga dipengaruhi oleh kurangnya pekerjaan yang fleksibel;
- Bekerja tanpa memiliki kontrak tertulis atau lisan (69 persen) menempatkan pekerja pada tingkat ketidakamanan kerja yang tinggi.

Keterampilan kerja dan aksesibilitas adalah dua hal yang harus dipertimbangkan oleh calon karyawan (pencari kerja). Dalam hal keterampilan kerja, kualitas modal manusia - khususnya tingkat pendidikan calon karyawan - adalah modal utama yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. **Meskipun pekerja muda memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hanya sekitar 14 persen responden dalam kelompok usia 15-30 yang telah menyelesaikan pendidikan SMA.** Akibatnya, kebanyakan dari mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan formal di perusahaan besar atau lembaga pemerintah.

Selain itu, 89 persen responden tidak pernah berpartisipasi dalam kursus bersertifikasi atau pelatihan kejuruan - cara penting lainnya untuk mendapatkan pekerjaan berupah. Sebagian besar responden (75 persen) tidak tahu di mana pelatihan seperti itu ditawarkan, dan bagi mereka yang tahu di mana tempatnya, tidak mampu membayar biaya baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengikuti kursus/pelatihan semacam itu.

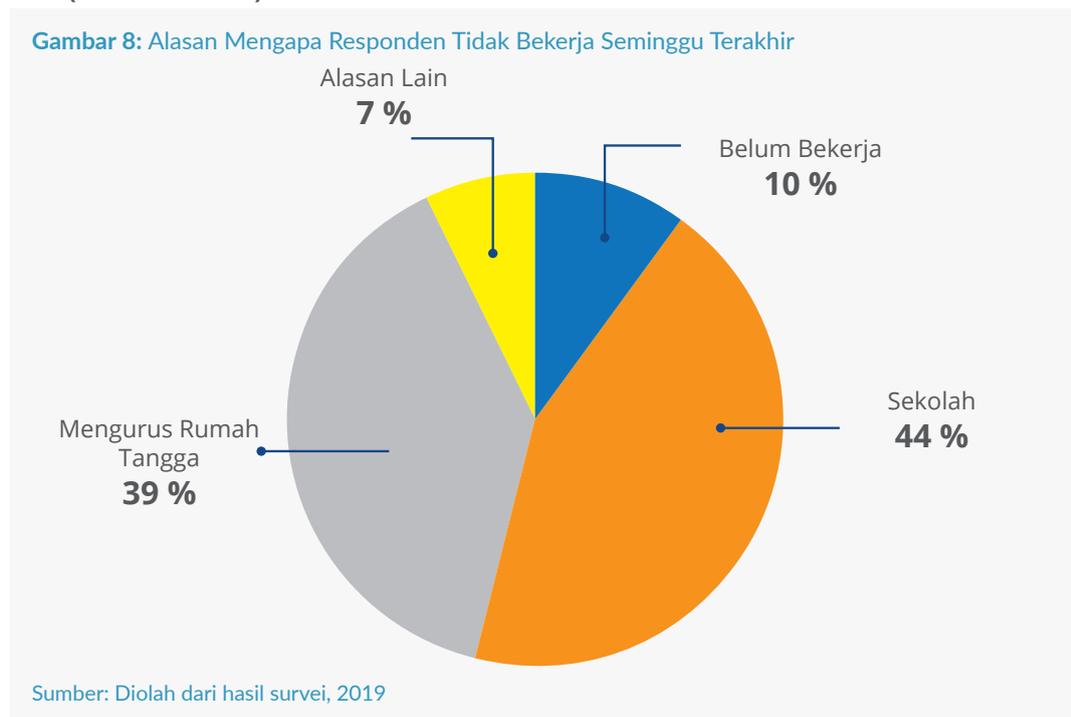
Dalam hal aksesibilitas, proses pencarian pekerjaan dibatasi oleh modal finansial yang terbatas. Responden yang tinggal di Pacitan perlu mencari pekerjaan non-pertanian di Surabaya, misalnya, membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang tidak sanggup mereka bayar. **Sekitar 26 persen dari mereka yang bekerja di sektor pekerjaan berupah mengambil pinjaman dari lembaga keuangan informal dan rentenir untuk memenuhi biaya tersebut.** Banyak yang tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu dan harus membayar bunga pinjaman yang tinggi (terutama jika pencarian pekerjaan tersebut terbukti tidak berhasil), sehingga mereka lebih jauh jatuh ke dalam kemiskinan.

Karena penyebaran informasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia melalui saluran formal tidak memadai, para pencari kerja bergantung pada modal sosial informal untuk memperoleh akses pekerjaan. Dari responden yang bekerja sebagai karyawan berupah, 89 persen mengatakan mereka mendapatkan pekerjaan melalui koneksi pribadi, 7 persen melamar langsung kepada atasan/pemberi kerjanya, 3,5 persen mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja, dan 0,7 persen menggunakan agen penempatan kerja. Di Pacitan, misalnya, siapa pun yang mencari pekerjaan musiman sebagai pekerja bangunan di luar daerah bergantung pada dukungan tetangga yang telah bermigrasi ke kota. Di Bandung Barat, beberapa orang memperoleh pekerjaan di pabrik-pabrik terdekat melalui referensi dari kerabat mereka.

Mengingat peran modal sosial dalam perolehan pekerjaan, para pencari kerja dengan jejaring sosial yang lemah (atau tingkat pendidikan yang tidak memadai) dapat menggunakan pialang/makelar untuk mengakses peluang tersebut. Hasil studi menunjukkan, hal ini tersebar luas di Bandung Barat, misalnya, di mana responden melaporkan biaya makelar pekerjaan atau suap pihak dalam perusahaan dapat mencapai Rp2 juta.

Karakteristik Anggota Keluarga PKH yang Tidak Bekerja

Di luar sampel, terdapat 164 anggota keluarga usia kerja yang saat ini tidak bekerja karena mereka belum memperoleh pekerjaan (aktif mencari pekerjaan), masih sekolah, mengurus keluarga atau karena 'alasan lain' (lihat Gambar 8).



Mereka yang menganggur (tetapi aktif mencari pekerjaan) cenderung laki-laki berusia 15-23 tahun yang baru saja menyelesaikan SMP tetapi masih mencari peluang kerja yang 'cocok'. Mereka umumnya merasa bahwa pekerjaan yang tersedia terlalu jauh, menanggukkan pilihan pekerjaan fisik, ingin jam kerja yang fleksibel atau lebih suka bekerja untuk diri sendiri. **Kelompok pemuda berpendidikan ini memiliki potensi pendapatan yang kuat tetapi mengingat ketidakcocokkan dalam preferensi, kemampuan mereka untuk mengubah ekonomi rumah tangga kurang dimanfaatkan. Paradoksnya, sebagian besar pengusaha melaporkan kesulitan memperoleh pekerja untuk mengisi posisi karyawan berketerampilan menengah hingga tinggi yang tidak dilamar oleh pencari kerja lokal.**

Di antara mereka yang tidak bekerja karena tugas mengurus keluarga, 94 persen di antaranya adalah perempuan. Sebagian besar laki-laki aktif mencari pekerjaan, dibandingkan dengan hanya 26 persen perempuan. Ini menunjukkan perlunya layanan pengasuhan anak yang terjangkau dan mudah diakses sehingga memungkinkan perempuan terlibat dalam angkatan kerja.

Disabilitas adalah alasan lain bagi mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan. Namun, sebagian besar orang di atas usia 15 tidak bekerja karena mereka masih bersekolah, menunjukkan potensi mereka untuk memperkuat ekonomi rumah tangga di masa depan.

AKSES TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MATA PENCARIAN DARI PEMERINTAH

Meskipun pemerintah lokal dan nasional menawarkan sejumlah besar skema pelatihan kejuruan dan intervensi lain untuk mengatasi hambatan mata pencarian, hanya 16 persen responden yang pernah menerima dukungan melalui intervensi tersebut. Bahkan beberapa yang telah berpartisipasi melaporkan bahwa skema tersebut hanya memberi sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi mereka. Intervensi mata pencaharian utama yang berafiliasi dengan pemerintah meliputi: pelatihan keterampilan pertanian; penyediaan benih atau pupuk; pelatihan pengolahan makanan; layanan dukungan bisnis untuk pemilik usaha kecil; pelatihan keterampilan kejuruan; dan pameran pekerjaan untuk menghubungkan individu-individu dengan pekerjaan upahan.

Pelatihan Keterampilan Pertanian dan Penyediaan Benih atau Pupuk

Pendidikan serta pelatihan teknis dan kejuruan untuk petani dan nelayan biasanya dilaksanakan melalui kombinasi skema tingkat nasional dan kabupaten yang dilaksanakan oleh dinas pertanian setempat atau dinas kelautan dan perikanan. Dinas-dinas ini berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk menyebarluaskan informasi dan mengundang partisipasi masyarakat setempat.

Namun, informasi tentang intervensi dan persyaratan untuk berpartisipasi sebagian besar disampaikan dari mulut ke mulut dan melalui poster yang dipajang di kantor desa. Sebagian besar keluarga PKH memiliki jaringan sosial dan hubungan dengan kantor desa yang terbatas, sehingga tidak menerima informasi ini. Petugas pelaksana program juga gagal menyebarkan berita secara efektif. Selain itu, peserta perlu melakukan perjalanan ke pusat kabupaten tempat dilaksanakannya pelatihan, sehingga membuat sebagian besar intervensi tersebut berada di luar jangkauan keluarga PKH.

Kualitas dan manfaat pelatihan sangat bervariasi dan beberapa kursus pelatihan yang ditawarkan tidak relevan dengan konteks mata pencarian setempat. Sebagai contoh, sebuah kursus pelatihan tentang pengolahan tuna ditawarkan di Pacitan, padahal industri tuna tidak aktif di daerah perdesaan terpencil ini. Namun, sejumlah kecil responden PKH yang menghadiri pelatihan di kebun dapur Surakarta sangat senang dengan kursus tersebut karena mengilhami mereka untuk mengurangi biaya rumah tangga dengan meningkatkan hasil produksi mereka sendiri. Kursus tambak udang di Indramayu mengharuskan peserta memiliki tambak udang sendiri, sehingga tidak dapat diakses oleh responden yang bekerja sebagai buruh di tambak udang orang lain.

Selain pelatihan, beberapa intervensi pemerintah daerah juga menyediakan beberapa hal lain seperti benih, pupuk bersubsidi dan alat pertanian. Namun, bantuan ini hanya diberikan melalui kelompok tani yang biasanya tidak termasuk responden PKH. Ketika ditanya apa yang dapat dilakukan pemerintah nasional dan daerah untuk meningkatkan layanan ini untuk keluarga PKH, responden membuat saran berikut:

- **Membuka partisipasi dengan meniadakan persyaratan apa pun terkait dengan keanggotaan kelompok ataupun kepemilikan modal.** Sebagai contoh, anggota PKH menginginkan skema bantuan traktor di Pacitan, tetapi mereka harus menjadi anggota kelompok tani untuk dapat mengajukan proposal ke Dinas Pertanian untuk mengakses bantuan traktor. Responden menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memenuhi prasyarat kepemilikan tanah dan kapal untuk bergabung dengan kelompok tersebut dan lebih suka bekerja sendiri untuk menghindari konflik kelompok;
- **Melengkapi pelatihan dengan menyediakan benih atau modal, misalnya, sehingga keluarga PKH dapat menerapkan keterampilan baru mereka;**
- **Menawarkan pelatihan teknik budidaya yang relevan dengan wilayah setempat.** Misalnya, keluarga PKH menganggap pelatihan menanam padi gogorancah di Indramayu bermanfaat karena melengkapi kegiatan utama mereka sebagai petani padi dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi.

Pelatihan Pemrosesan Makanan dan Layanan Dukungan Usaha untuk Pemilik UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten menjalankan intervensi bagi pemilik usaha yang meliputi: **pelatihan pemrosesan dan pengemasan produk yang akan dipasarkan; pinjaman dan hibah untuk memperluas usaha yang ada; bantuan dalam mendapatkan izin usaha; dan konsultasi untuk menghubungkan usaha kecil ke pasar yang lebih besar.** Sementara sejumlah dinas di semua wilayah penelitian menawarkan pelatihan kejuruan, hanya Surakarta yang menawarkan layanan usaha lainnya (walaupun tidak dalam tiga tahun terakhir).

Buruknya penyebaran informasi kepada keluarga PKH tetap menjadi tantangan terbesar dan hanya berkontribusi pada 17 persen responden PKH yang mengakses layanan ini. Responden juga mengklaim bahwa pelatihan yang ditawarkan tidak lengkap dan tidak membantu mereka untuk mengelola usaha yang ada menjadi lebih baik. Misalnya, keluarga PKH di Indramayu pernah mengikuti pelatihan tentang pengolahan ikan asin dan pasta udang karena bahan baku tersedia secara lokal. Namun, pelatihan tersebut tidak termasuk: cara mengemas barang-barang ini supaya menarik bagi pelanggan; cara mengakses pasar yang lebih besar atau membentuk hubungan dengan pembeli perantara; atau dasar-dasar pembukuan dan aspek lain dari manajemen bisnis.

Pemerintah kabupaten telah mencoba untuk mengatasi kesenjangan ini dan memberikan layanan dukungan yang lebih baik bagi pemilik UMKM. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan 31 kecamatan bekerjasama untuk mengeluarkan izin usaha bagi pemilik UMKM dan Pemerintah Kota Surakarta menawarkan pelatihan inovatif tentang daur ulang sampah plastik menjadi barang yang dapat dikonsumsi (seperti gelas dan piring). Di Pacitan, fasilitator PKH menghubungkan UMKM dengan Pusat Layanan Bisnis Terpadu (PLUT) untuk memperluas layanan mereka ke keluarga PKH. Mereka berpotensi bekerjasama dengan pusat layanan ini untuk memberikan dukungan usaha kepada anggota keluarga PKH yang memiliki UMKM. Khususnya mengingat bahwa sudah ada kesepakatan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam hal bantuan modal kepada pemilik usaha, skema hibah dan pinjaman terbatas ditawarkan bagi keluarga PKH yang ingin memperluas usaha mereka. Kredit mikro (KUR) tersedia untuk keluarga PKH di Bandung Barat, tetapi prasyarat untuk mengajukan permohonan adalah memiliki usaha yang sudah berjalan dan layak serta adanya bukti jaminan. Mengingat bahwa sebagian besar usaha yang dikelola keluarga PKH tergolong baru lahir, berskala kecil, dan tidak memiliki analisis laba, membuktikan keberlangsungan usaha kepada pihak pemberi pinjaman menjadi hal yang sulit. Selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan yang memadai untuk menjamin pinjaman mereka. **Sebagian besar responden PKH juga enggan mengambil risiko dan memilih untuk tidak mengajukan pinjaman yang tidak dapat mereka bayar.** Di sisi lain, pinjaman lunak yang ditawarkan melalui organisasi non-pemerintah dipandang berguna, **terutama karena pinjaman tersebut disertai dengan pelatihan tentang mengelola keuangan dan mengoperasikan usaha.** Hanya responden PKH di Bandung Barat yang mengakses pinjaman ini.

Intervensi untuk Menghubungkan Individu dengan Pekerjaan Berubah

Intervensi tingkat nasional dan lokal untuk menghubungkan individu dengan pekerjaan berubah tersedia di empat kabupaten studi dan dipimpin oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat, meskipun tidak lazim seperti inisiatif lainnya. Intervensi ini termasuk pelatihan yang ditawarkan melalui pusat pelatihan keterampilan kejuruan (BLK), pelatihan berbasis kompetensi, dan bursa kerja.

Tiga dari empat kabupaten lokasi penelitian memiliki pusat pelatihan keterampilan kejuruan (kecuali Bandung Barat) yang pada prinsipnya menyediakan pelatihan kejuruan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan pelatihan di tempat kerja pada sektor-sektor tertentu. Layanan tersebut gratis dan sudah termasuk tunjangan hidup harian dan biaya transportasi, sehingga memungkinkan orang-orang dari daerah terpencil dengan sarana sederhana untuk berpartisipasi. Hanya skema pusat pelatihan keterampilan kejuruan di Surakarta yang menawarkan layanan pelatihan '3 in 1', sertifikasi dan penempatan.

Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan setempat juga menyediakan pelatihan kejuruan berbasis kompetensi lainnya bagi mereka yang sudah terlibat dalam sektor tertentu, tetapi ingin memperbarui keterampilan mereka agar tetap kompetitif. Bandung Barat dan Indramayu menawarkan kursus seperti pengelasan, reparasi alat pendingin, perbaikan sepeda motor dan mobil, dan komputer. Kursus-kursus ini tidak menawarkan sertifikat kompetensi atau layanan penempatan kerja, dan cenderung memiliki lebih sedikit peserta.

Umumnya, anggota keluarga PKH tidak mengetahui adanya tawaran mengikuti pelatihan atau kursus di pusat pelatihan keterampilan kejuruan dan pelatihan berbasis kompetensi. Mereka yang telah berpartisipasi mengatakan bahwa pelatih tidak memiliki pengalaman dibidang industri dan program tersebut tidak membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Pameran kerja juga diselenggarakan di Surakarta dan Pacitan yang bekerja sama dengan pengusaha di daerah yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Ketenagakerjaan. Pameran kerja adalah acara rutin bagi masyarakat umum, tetapi keluarga PKH jarang menghadirinya. Informasi tentang pameran kerja tidak didistribusikan secara luas ke kecamatan dan desa, dan responden juga merasa bahwa biaya menghadiri acara tersebut lebih besar daripada manfaatnya (tidak ada jaminan memperoleh pekerjaan).

MATA PENCARIAN KOMPLEMENTER BAGI KELUARGA PKH

Selain intervensi mata pencarian utama yang dibahas pada bagian sebelumnya, beberapa program pelengkap dirancang khusus untuk keluarga PKH untuk meningkatkan kapasitas produktif mereka. Semua ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan mencakup: manajemen keuangan dan pembinaan ekonomi melalui *Family Development Session* PKH (dikenal sebagai P2K2); kelompok usaha melalui kelompok usaha bersama PKH (KUBE PKH); dan kios elektronik berbasis komunitas dan agen mobile banking yang dikelola melalui e-Warong KUBE PKH. Intervensi ini khusus bagi penerima manfaat PKH langsung dan tidak diperluas ke anggota usia kerja lainnya pada rumah tangga PKH.

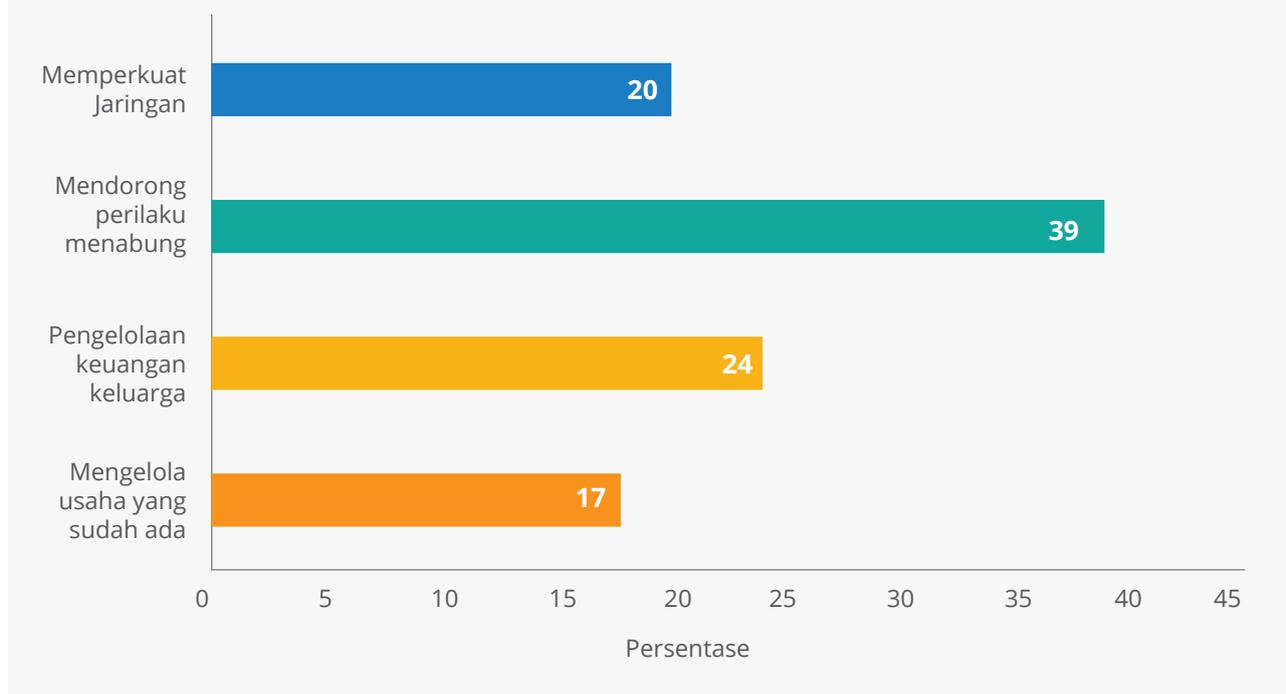
Ketika Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan di semua wilayah studi, KUBE PKH hanya tersedia di Bandung Barat dan Indramayu, sementara e-Warong KUBE PKH hanya diimplementasikan di Surakarta. **Hampir semua responden berpartisipasi dalam sesi pembinaan keuangan keluarga, kira-kira 20 persen yang berpartisipasi dalam e-Warong KUBE PKH (hanya di Surakarta) dan kurang dari 1 persen yang berpartisipasi dalam KUBE PKH.**

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (*Family Development Sessions*)

Family Development Sessions (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga - P2K2) adalah modul terstruktur yang disampaikan setiap bulan oleh fasilitator PKH kepada penerima manfaat perorangan dalam kelompok. Sesi ini terdiri dari modul mengenai: kesehatan dan gizi; perawatan dan pendidikan anak; serta manajemen keuangan dan meningkatkan ekonomi rumah tangga. Menurut Kementerian Sosial, sesi ini dirancang untuk mendidik penerima PKH tentang pentingnya mencapai hasil spesifik di setiap bidang modul ini dan untuk membantu mereka mengenali dan mengatasi kendala yang mereka hadapi (Kementerian Sosial, 2017).

Modul manajemen keuangan dan pembinaan ekonomi keluarga mencakup bagian spesifik tentang menabung, perencanaan usaha, dan pemasaran. Di Bandung Barat modul ini dimulai pada tahun 2015 dan di Surakarta pada tahun 2018, sedangkan fasilitator PKH di Indramayu dan Pacitan berencana akan memulai memberikan modul ini pada tahun 2019. Namun demikian, 63 persen responden mengatakan bahwa sesi ini bermanfaat dalam mendukung kegiatan ekonomi mereka, terutama dalam hal memperkuat jejaring sosial mereka, mendorong kebiasaan menabung, mengelola pengeluaran rumah tangga, dan memotivasi mereka untuk memulai usaha (lihat Gambar 9).

Gambar 9: Manfaat P2K2 dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Responden, Berdasarkan Jenis Kejadiannya



Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH)

Program kelompok usaha bersama PKH (KUBE PKH) adalah skema usaha kelompok yang terdiri atas sepuluh penerima manfaat PKH untuk mengelola usaha kolektif atau usaha individual yang dikelola melalui kelompok. Satu kelompok menerima hibah sebesar Rp20 juta (sekitar AUD2.000) untuk digunakan sebagai modal awal untuk pengembangan usaha. Kelompok ini dikelola oleh seorang fasilitator KUBE PKH yang memberikan dukungan rutin dalam pembentukan kelompok, mendirikan usaha, pembukuan, saluran pemasaran, dan sebagainya. Fasilitator mendampingi kelompok KUBE PKH selama kurang lebih satu tahun, yang pada saat itu kelompok-kelompok tersebut dianggap mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota yang berpartisipasi dan juga sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan memperkuat semangat kewirausahaan di antara anggota PKH (Kementerian Sosial, 2017).

Dana hibah KUBE PKH disalurkan ke empat kelompok di Bandung Barat, 20 kelompok di Indramayu dan tiga kelompok di Surakarta. Namun, hanya sejumlah kecil responden yang menjadi bagian dari kelompok-kelompok ini dan tidak ada kelompok yang masih beroperasi selama periode penelitian. Para responden menyebutkan sejumlah alasan mengapa kelompok-kelompok tersebut tidak bertahan lama dan memiliki dampak yang terbatas di daerahnya:

- Pilihan jenis usaha sebagian besar ditentukan oleh fasilitator KUBE PKH daripada oleh penerima manfaat;
- Fasilitator seringkali yang memilih siapa saja anggota kelompoknya dan penerima manfaat jarang memiliki kesempatan untuk mengorganisir diri mereka sendiri;
- Fasilitator mendukung kelompok-kelompok tersebut hanya selama satu tahun sampai pencairan hibah terakhir, tetapi tidak melakukan pemantauan lebih lanjut untuk melihat apakah usaha-usaha tersebut berjalan secara efektif atau apakah kelompok-kelompok itu berkelanjutan.

Salah satu contoh yang dikutip oleh responden di Bandung Barat adalah mengenai usaha pengembangbiakan kambing. Fasilitator mengira usaha tersebut memiliki potensi kuat di daerah setempat dan memilih anggota kelompok dengan pengalaman yang relevan, serta menasihati mereka untuk menanamkan modalnya dalam membeli kambing. Meskipun pada awalnya mereka memperoleh lebih banyak kambing, dalam jangka panjang kambing yang tidak dirawat dengan baik akan dijual sebelum waktunya atau dikonsumsi. Menurut salah satu responden PKH:

'Prinsip KUBE PKH adalah "dari, oleh, dan untuk masyarakat" tetapi kami tidak diberi ruang untuk mengeluarkan ide untuk bisnis yang harus kami jalankan.. Jadi kami tidak ingin melanjutkannya'

Kelompok Usaha Bersama untuk Kios Elektronik Berbasis Komunitas dan Agen Mobile Banking

Kelompok usaha bersama untuk kios elektronik berbasis komunitas dan agen mobile banking (e-Warong KUBE PKH) menyediakan toko serba ada: toko kelontong yang menjual makanan pokok; tempat pencairan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan dana PKH, serta tempat untuk menjual barang yang diproduksi oleh kelompok usaha bersama. Untuk pengaturan e-Warong, lokasinya harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut: koneksi internet yang andal dan pasokan listrik yang stabil; adanya 500 hingga 1.000 penerima bantuan sosial yang akan menggunakan layanan; dan ruang yang disediakan (atau disetujui) untuk toko oleh anggota KUBE di daerah tersebut. Selain itu, penerima PKH yang mengoperasikan e-Warong harus menjadi agen bergerak dan mengucurkan dana bantuan sosial kepada penerima manfaat di daerah tersebut. Studi ini menemukan ternyata e-Warong hanya ada di Surakarta, yang menjelaskan mengapa hanya 19 persen dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam skema ini.

Inisiatif e-Warong dianggap sebagai praktik baik di Surakarta, berkat adanya dukungan kuat pemerintah daerah terhadap skema tersebut. Pemerintah daerah membiayai beberapa kios e-Warong menggunakan sumber daya lokal (APBD). Dinas Sosial juga menetapkan kebijakan afirmatif dimana 65 persen dari BPNT akan didistribusikan melalui platform ini, menyisakan hanya 35 persen untuk didistribusikan melalui agen-agen bank komersial. Selain itu, fasilitator PKH di daerah tersebut sangat mendorong semua keluarga PKH untuk membelanjakan setidaknya Rp10.000 per bulan di toko e-Warong KUBE PKH. Menurut seorang fasilitator PKH:

'Penerima bantuan PKH harus saling mendukung - jika mereka diminta untuk membelanjakan jumlah minimum di e-Warong PKH, toko-toko ini akan memiliki penghasilan tetap yang dapat mereka andalkan. Kalau tidak, mereka tidak dapat bersaing dengan warung lain yang lebih mapan.'

MEMPERKUAT PELUANG EKONOMI BAGI KELUARGA PKH: LANGKAH KE DEPAN

Anggota usia kerja dalam keluarga PKH mengalami keterbatasan pekerjaan yang layak, meskipun 'keterbatasan' ini berbeda satu dengan lainnya dan tergantung pada konteksnya. Misalnya, lebih dari 50 persen mata pencarian utama responden di bidang pertanian, namun petani PKH tidak memiliki jaringan sosial, sumber keuangan, sumber daya alam, dan modal fisik (tanah dan alat) berkualitas tinggi untuk mendapatkan upah yang layak dari kegiatan pertanian mereka. Sumber daya manusia juga memainkan peran penting. Anggota keluarga PKH usia muda memiliki modal manusia yang lebih baik, tetapi seringkali tidak memiliki keinginan untuk mengejar peluang ekonomi yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Intervensi komplementer yang ada juga gagal menangani keterbatasan ini dan tidak mampu menawarkan peluang mata pencarian berkelanjutan untuk segmen termiskin dari populasi.

Saran praktis untuk memperkuat peluang usaha mikro dan memungkinkan akses ke pekerjaan formal dijelaskan di bawah ini. Yang pertama dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan siklus usaha yang umumnya dialami oleh pemilik pertanian PKH dan pemilik UMKM. Mengingat bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas atau minat untuk menjadi pengusaha, yang disebut terakhir ini menjelaskan jalur alternatif bagi mereka yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk mengejar pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan keterampilan rendah. Ini sangat relevan bagi mereka yang berada dalam kelompok usia 15-30 yang memiliki potensi untuk mengubah ekonomi rumah tangga dengan peluang yang tepat.

Memperkuat Peluang Usaha Mikro

- **Memfasilitasi petani PKH untuk menghasilkan barang yang memiliki permintaan pasar besar.** Saat ini sebagian besar petani berorientasi komersial dan 62 persen petani bercita-cita untuk meningkatkan pendapatan mereka. Petani di daerah perdesaan memiliki potensi untuk menanam tanaman palawija bernilai tinggi, seperti jagung, yang membutuhkan lebih sedikit lahan dan irigasi, memiliki pemasok terbatas di pasar dan permintaan lokal yang besar. Memproduksi ayam dan telur puyuh di Pacitan dan membudidayakan ikan lele di Indramayu adalah contoh komoditas bernilai tinggi lainnya yang secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan di daerah perdesaan dan pesisir.
- **Mendorong tumbuhnya hubungan pasar yang lebih kuat antara keluarga PKH dan pembeli lokal.** Petani PKH memiliki jaringan sosial yang terbatas dan membuatnya sulit menjalin hubungan dengan pelaku pasar. Akibatnya, petani dan nelayan PKH tidak dapat menjual langsung ke pembeli di daerah tersebut, dan sering menjual kepada perantara yang eksploitatif. Pembeli bersedia untuk berhubungan langsung dengan petani dan nelayan PKH dan memotong peran tengkulak, tetapi ini membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Memorandum kesepahaman antara petani PKH (difasilitasi melalui instansi pemerintah daerah) dan pembeli sektor swasta dapat membantu petani miskin untuk memaksimalkan efisiensi dan pendapatan.
- **Memfasilitasi operator UMKM untuk mendapatkan izin usaha industri rumah tangga.** Ini akan memungkinkan pengusaha pengolahan makanan yang miskin (yang sebagian besar adalah perempuan) untuk secara signifikan meningkatkan basis pelanggan mereka dan dengan percaya diri menjalankan usaha mereka tanpa takut akan otoritas yang berwenang. Intervensi akan membutuhkan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja (baik di tingkat nasional dan lokal) untuk memastikan bahwa proses mendapatkan izin disederhanakan untuk pengusaha miskin; prosesnya disosialisasikan, khususnya kepada keluarga penerima PKH; dan bahwa layanan aplikasi izin tersedia di tingkat desa sehingga mudah diakses.
- **Mentransformasikan KUBE PKH menjadi program inklusi produktif bagi keluarga PKH individu dengan potensi dan minat perusahaan yang besar.** KUBE PKH adalah intervensi mata pencarian utama yang tersedia bagi keluarga PKH, meskipun partisipasi, dampak dan keberlanjutan program ini terbatas. Direkomendasikan bagi Kementerian Sosial untuk memodifikasi Model Graduasi⁵ yang diakui secara internasional untuk konteks Indonesia, menyiapkan anggota PKH dengan kapasitas kewirausahaan untuk membangun mata pencarian yang berkelanjutan. Prinsip panduan untuk implementasi meliputi:

⁵ Pendekatan Graduasi yang sebenarnya adalah serangkaian intervensi yang komprehensif, terikat waktu dan berurutan yang bertujuan untuk mengeluarkan orang-orang dari kemiskinan dan memasukkan ke dalam skema kehidupan yang berkelanjutan. Walaupun evaluasi pendekatan ini sangat menjanjikan, program-program Graduasi yang dilaksanakan melalui organisasi donor dan LSM berbiaya mahal dan dilaksanakan dalam skala kecil. Pemerintah, terutama di Amerika Latin, sejak itu menyederhanakan pendekatan dan membuatnya lebih hemat biaya dan terukur. Lihat: <https://www.poverty-action.org/program-area/social-protection/ultra-poor>

1. Melakukan penilaian pasar untuk menginformasikan jenis usaha yang menguntungkan di daerah tersebut
2. Melakukan screening terhadap keluarga PKH untuk mengidentifikasi siapa diantara anggota keluarganya yang memiliki kapasitas dan minat pengusaha
3. Mendukung keluarga terpilih melalui fasilitator usaha yang berdedikasi
4. Menyediakan tambahan modal bagi pemilik usaha untuk investasi usaha, panduan untuk mengembangkan rencana bisnis, sesi rutin 'pelatihan bisnis' dan menghubungkan dengan sistem pasar. Pada tahun ketiga, fasilitator usaha selanjutnya dapat menghubungkan usaha yang menguntungkan dengan layanan keuangan mikro untuk memastikan keberlanjutan usaha.

Mengingat bahwa prinsip utama dari program Graduasi adalah pembinaan langsung usaha, karenanya fasilitator PLUT dapat dimanfaatkan sebagai fasilitator usaha PKH sebagai cara untuk mengurangi biaya program dan memaksimalkan efisiensi. Implementasi yang sukses akan membutuhkan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian fasilitator PLUT di tingkat daerah.

Membuka Kemungkinan Keterlibatan Keluarga PKH dalam Pekerjaan di Sektor Formal

- **Menyediakan intervensi pelengkap yang dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga PKH dalam usia kerja.** Intervensi mata pencarian PKH yang ada hanya menargetkan penerima PKH, meskipun mereka mungkin bukan titik masuk yang paling cocok. Studi ini telah menyoroti bahwa banyak wanita dibebani dengan tugas mengurus keluarga dan anggota rumah tangga lainnya (khususnya mereka yang berada di kelompok usia 15-30 dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi), yang mungkin berada dalam posisi lebih baik untuk mengelola usaha.
- **Memetakan kebutuhan pelatihan, sertifikasi dan penempatan keluarga PKH berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja.** Dinas Tenaga Kerja di Surakarta telah mulai mengembangkan database pelatihan dan kebutuhan penempatan pemberi kerja bagi mereka yang saat ini belum bekerja. Pengumpulan data dilakukan oleh desa, dengan tujuan menyediakan layanan pencarian kerja lokal sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Jika ada inisiatif seperti ini, fasilitator PKH dapat berperan dalam memetakan informasi ini bagi keluarga PKH dan memasukkannya ke dalam sistem.
- **Mengatur mekanisme koordinasi antar kementerian sehingga penerima manfaat perlindungan sosial dapat mengajukan kartu pra-kerja.** Ketika pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja, perlu memastikan bahwa penerima perlindungan sosial memiliki akses masuk terhadap program tersebut. Skema subsidi menawarkan pelatihan teknis dan sertifikasi untuk memberikan para pelajar yang sudah lulus keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki saat ini. Program ini juga menawarkan dukungan saat mereka mencari pekerjaan. Sebuah nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja akan membantu memastikan bahwa segmen penduduk termiskin memperoleh manfaat dari inisiatif kebijakan baru ini.
- **Memfasilitasi partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar melalui pendirian tempat pengasuhan anak.** Hanya 30 persen perempuan dalam keluarga PKH yang terlibat dalam pekerjaan berupah karena kebutuhan mereka terhadap pekerjaan dengan waktu yang fleksibel, yang tidak ditawarkan sebagian besar pemberi kerja. Studi ini juga menunjukkan bahwa banyak wanita dalam keluarga PKH didorong untuk tetap di rumah sampai anak-anak mereka mencapai usia sekolah. Di mana pada titik itu mungkin sulit untuk kembali terlibat dalam sektor pekerjaan (terutama untuk pekerja wanita berketerampilan tinggi dan berpendidikan). Ada kebutuhan besar untuk layanan pengasuhan anak di wilayah setempat, sehingga perempuan yang rentan, seperti penerima PKH, dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja jika mereka menginginkannya.
- **Fasilitator PKH dapat berperan dalam memastikan bahwa keluarga PKH memperoleh informasi mengenai layanan ketenagakerjaan di daerah tersebut.** Mereka dapat memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang bursa kerja dan layanan terkait pekerjaan lainnya kepada keluarga PKH, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi. Di Bandung Barat ada permintaan kuat untuk tenaga kerja berketerampilan tinggi dari pabrik-pabrik tekstil besar dan tenaga kerja berketerampilan rendah di antara perusahaan-perusahaan tekstil kecil. Meskipun peraturan pekan pameran kerja dilakukan, keluarga PKH jarang diberi tahu. Nota Kesepahaman antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial setempat akan membantu memastikan bahwa pelaksana program PKH memperbaharui informasi mengenai layanan pekerjaan yang ditawarkan dan tersedia di daerah tersebut secara teratur, dan dapat membantu mensubsidi biaya bagi keluarga PKH untuk memanfaatkan layanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) (2013, 2014, 2015, 2017). Survei Angkatan Kerja Nasional, Jakarta: BPS.

Bank Dunia (2019). Dokumen Informasi Program: Proyek Pengembangan Keterampilan Indonesia, Washington DC: Bank Dunia

Cahyadi N, R Hanna, BA Olken, RA Prima, E Satriawan dan E Syamsulhakim (2018). Dampak Kumulatif dari Program Bantuan Tunai Bersyarat: Bukti Eksperimental dari Indonesia, Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), doi: 10.3386 / w24670, Tersedia online di: <https://economics.mit.edu/files/15075> (Diakses 15 April 2018)

Departemen Pembangunan Internasional (DFID) (1999). Lembar Panduan Mata Pencarian Berkelanjutan, London: DFID

Gertler P, S Martinez dan M Rubio-Codina (2012). 'Menginvestasikan Transfer Tunai untuk Meningkatkan Standar Hidup Jangka Panjang', *Jurnal Ekonomi Amerika: Ekonomi Terapan* 4 (1): 164–92

Handa S, S Daidone, A Peterman, B Davis, A Pereira dan T Palermo (2017). Menghilangkan Mitos? Menghadapi Enam Persepsi Umum tentang Transfer Tunai Tanpa Syarat sebagai Strategi Pengurangan Kemiskinan di Afrika, *Kertas Kerja Innocenti No 2017-11*, Roma dan Jenewa: FAO dan UNICEF

Kementerian Sosial (Kemensos) (2017). E-warong KUBE-PKH, Jakarta: Kementerian Sosial RI (situs web), Tersedia di: <https://www.kemensos.go.id/content/e-warong> (Diakses 18 Mei 2019]

Manajemen Kebijakan Oxford dan Institut Studi Pembangunan (OPM dan IDS) (2012). Program Jaring Pengaman Kelaparan Kenya: Komponen Pemantauan dan Evaluasi Laporan Evaluasi Dampak Kuantitatif, Oxford: Manajemen Kebijakan Oxford

McCord and Slater (2015). 'Perlindungan Sosial dan Graduasi melalui Pekerjaan yang Berkelanjutan', *Buletin IDS* 46 (2): 134-44

TNP2K. 2015. Bantuan Tunai Bersyarat Indonesia untuk Keluarga Miskin. Jakarta: Kantor Wakil Presiden

TNP2K 2018. Masa Depan Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia: Perlindungan Sosial untuk Semua, Jakarta: TNP2K, Kantor Wakil Presiden





MAHKOTA
Towards a Strong and Prosperous
Indonesian Society

Dukungan untuk publikasi ini telah disediakan oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang diungkapkan dalam karya ini tidak serta merta mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Australia. Anda bebas menyalin, mendistribusikan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial.

MAHKOTA Program

Lantai 8, Grand Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih 35, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
email: communications@mahkota.or.id